

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

(Studi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo)

Zulkifli

zulkifli@stiasetihsetiomb.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

ABSTRAK

Artikel ini bermula dari masih banyaknya masalah administrasi kepegawaian yang ada di kepegawaian kabupaten bungo dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 1 orang key informan dan 9 orang ordinary informan.

Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif didapatkan hasil penelitian diantaranya perlunya Analisis Perencanaan Pegawai dan Penempatan Pegawai sebagai informasi data input SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo, perlunya Analisis pengembangan pegawai (Diklat), sebagai informasi data proses SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo, Analisis Manajemen pegawai sebagai informasi data output untuk Aplikasi SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo

Efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo sudah berjalan sesuai standarnya, namun masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang belum mengentrikan data-data kepegawaiannya.

Kata Kunci :Efektivitas, Sistem Informasi Kepegawaian, Tertib Administrasi, Kabupaten Bungo

ABSTRACT

This article begins with the many staffing administrative problems that exist in the bungo district staffing using descriptive methods and qualitative approaches with the number of informants as many as 1 key informant and 9 ordinary informants.

Using descriptive data analysis techniques, the results of the study included the need for Analysis of Employee Planning and Employee Placement as information on the SIMPEG input data of the Bungo District Government, the need for employee development analysis (Diklat), as information on the Bungo District SIMPEG process data, employee management analysis as data output information for the SIMPEG Application of the Bungo District Government

The effectiveness of the application of the personnel information system in increasing orderly personnel administration at the Bungo Regency Personnel and Education and Training Agency is already in line with its standards, but it is still not optimal, this is because there are still Bungo District Government employees who have not registered their personnel data.

Keywords: Effectiveness, Personnel Information System, Orderly Administration, Bungo Regency

PENDAHULUAN

SIMPEG adalah sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Pembuatan SIMPEG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan informasi tentang keadaan data pegawai terkini, baik ditingkat Pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga data pegawai yang ada akan memberikan manfaat bagi pegawai yang bersangkutan dan pihak lain yang membutuhkan, serta kebutuhan Organisasi khususnya. Fungsi utama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yaitu membantu memberikan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk bahan analisa pimpinan dalam pengambilan keputusan, karena SIMPEG ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 dimana terdiri dari: modul Data Induk Pegawai, modul Data Pelatihan, modul Promosi Jabatan, modul Tanda Jasa, modul Data Mutasi, modul Data Cuti, modul Data Hukuman, modul Laporan.

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan diklat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo mempunyai fungsi sebagai berikut Tatang (2003:1)

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
2. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan diklat;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan diklat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Menurut pengamatan awal peneliti terhadap pemanfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo telah berjalan seperti prosedur yang telah ditentukan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Sebagian data kepegawaian yang masuk ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih belum akurat;
2. Aplikasi SIMPEG tersebut digunakan tidak fleksibel artinya Aplikasi SIMPEG dari Kemendagri masih perlu diperbaharui, sehingga membutuhkan biaya tambahan setiap mengupdate;
3. Kurangnya tenaga operator yang diperlukan untuk mengelola SIMPEG tersebut;

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo?

LANDASAN TEORI

Definisi lain dari sistem yang dikemukakan oleh Hartono Jogyanto (2005:3) adalah "Kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu

dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Lucas dalam Kumorotomo W dan Margono, “Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu”.

Menurut Sumantri dalam syafie (2008::16), mengemukakan bahwa: “Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan”.

Memperhatikan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah jaringan prosedur pengelompokan data yang dilakukan oleh manusia mulai dari pengumpulan data (*input*) kemudian analisis data (*process*) yaitu: pengolahan data ataupun informasi sebagai hasil olahan, sampai akhirnya pengambilan data untuk penyebaran informasi (*output*). Kegiatan operasional ini dilaksanakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dengan maksud memberikan informasi kepada manajemen bila setiap waktu diperlukan dengan cepat dan akurat.

Menurut Henry Simamora(2004:90), mengemukakan bahwa: “Sistem informasi manajemen kepegawaian adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, karakteristik-karakteristik unit-unit organisasi.

Menurut Mc. Leod dalam Hartono Jogyanto, *Human Resources Information System* (HRIS) ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yaitu berkenaan dengan merancang format-format data kepegawaian dan mengatur sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan informasi kepegawaian yang terdiri dari data pegawai, data jabatan, data pendidikan, data penghargaan, data pendidikan dan pelatihan, data keluarga, data kehadiran dan lain-lain, sehingga dapat dikelola informasi tentang perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, pembinaan dan pengembangan karirnya, kesejahteraan, serta pemberhentian atau kepensiuannya.

Menurut Musanef, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu tatanan bagi proses pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang administrasi dan manajemen yang berkaitan dengan pegawai.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 tentang *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*, pengertian sistem informasi manajemen kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, tujuan dan manfaat dibuatnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Tujuan SIMPEG di Lingkup Pemerintahan:

1. Untuk mendukung sistem manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.
2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
3. Menyediakan informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,

pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan

Adapun manfaat dari SIMPEG tersebut adalah:

1. Pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat.
2. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.
3. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala
4. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian
5. Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan akurat
6. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya
7. Merencanakan kebutuhan pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)

Secara khusus pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian oleh instansi atau pemerintah lebih lanjut diatur dalam pasal 3 (ayat 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa SIMPEG Kabupaten/kota berkedudukan di Kabupaten/Kota yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota.

Menurut Syafiie (2006:64), yang dimaksud dengan administrasi kepegawaian adalah: suatu seni untuk memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang cakap sedemikian rupa, sehingga fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan penghematan yang sebesar-besarnya.

Moekijat mengartikan secara singkat pengertian administrasi kepegawaian sebagai berikut:

- a. Segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian;
- b. Segenap aktivitas yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga

kerja dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu;

- c. Aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya secara seimbang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok, obyek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data dan fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang berlaku.

Berkaitan dengan metode penelitian deskriptif, dikatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi.²⁴ Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi pada hakikatnya mencari pemahaman observasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo pada hakikatnya adalah sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo. Dimana saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo sudah mencapai 6.397 orang (Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Januari 2015) sedangkan jumlah pegawai BKD sebagai pengelola data PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo hanya berjumlah 49 orang. Untuk menghasilkan informasi kepegawaian guna menjadi acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen kepegawaian, BKD menjalankan sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Gambaran implementasi SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo ini akan tampak lebih jelas apabila ditelusuri sejak awal pembangunan pertama sistem informasi.

Adapun komponen atau kegiatan utama dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yaitu terdiri atas *input*, proses dan *output*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yurnalion, selaku Kasubbag. Program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo.

“...Prosedur kerja SIMPEG terdiri dari tiga kegiatan yaitu input, proses dan output. Dimana input merupakan data-data kepegawaian yang kemudian diproses sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, informasi itu kemudian

dapat pula dijadikan kembali sebagai data kepegawaian”

Kemudian Yurnalion menambahkan,

“Manfaat dari SIMPEG sangat banyak manfaatnya antara lain: lebih mudah diketahui informasi data pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintah Kabupaten Bungo, Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat, mulai penempatan awal pegawai tersebut sekaligus mengetahui pegawai mana yang sudah ikut diklat apa-apa saja jenis diklatnya, pokoknya banyak lah manfaatnya intinya yah memudahkan kita untuk mengolah data kepegawaian. Yang pastinya kami berikan informasi sesuai dengan kebutuhan”

Berdasarkan hasil wawancara bersama M. Yusuf selaku Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bungo,

“Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Ulang Pendataan Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015, untuk pendataan ulang kepegawaian lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sudah pernah kita lakukan pada tahun 2013, namun berdasarkan pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan Kepala BKN tersebut, pegawai negeri sipil Kabupaten Bungo telah melakukan pendataan ulang sebanyak kurang lebih 5.000 orang dari 6.397 orang pegawai yang ada”.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, maka kita melihat akan 3 (tiga) tujuan utama atau manfaat penerapan sistem informasi kepegawaian itu sendiri, diantaranya:

Analisis perencanaan dan penempatan pegawai sangat penting dilakukan, karena perencanaan pegawai yang baik akan memperbaiki pemanfaatan pegawai, menyesuaikan aktivitas pegawai dan kebutuhan pegawai di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam merekrut pegawai baru serta melengkapi informasi tentang kepegawaian yang dapat membantu kegiatan kepegawaian dan unit instansi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hasna selaku Kabid. Perencanaan & Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo,

“Melalui perencanaan dapat kita ketahui kekurangan dan kelebihan pegawai negeri sipil yang kita miliki dan kita butuhkan saat ini, sehingga disaat membutuhkan penambahan pegawai tersebut, kita dapat melakukan pengajuan kebutuhan pegawai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, setelah diajukan dan disetujui untuk melakukan perekrutan, promosi pegawai, dan transfer pegawai secara proaktif sehingga tidak mengganggu kegiatan instansi pemerintah Kabupaten Bungo lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Vivin Anugrah selaku salah satu Staf Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo,

“fungsi SIMPEG lainnya adalah memberikan penilaian kinerja dalam menunjang penempatan pegawai berdasarkan data umum yang dimiliki oleh pegawai,

misalnya dilihat dari segi pendidikan, ketika ada jabatan yang kosong, maka Subbagian Perencanaan Pengadaan memanfaatkan SIMPEG dalam menentukan pegawai yang akan menduduki jabatan yang kosong tersebut setelah pegawai tersebut telah memenuhi semua kualifikasi yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat memberikan informasi dan membantu BKD dalam mengambil keputusan dibidang perencanaan dan penempatan pegawai sesuai dengan instansi yang membutuhkan.

Pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Pengembangan dan pelatihan manajemen sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, merupakan salah satu untuk mewujudkan professional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ma'ruf selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo,

“...orientasi pengembangan dan pelatihan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mewujudkan professional pegawai yang mengutamakan, tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang

menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada”.

Kemudian Ma'ruf menambah, “dengan adanya SIMPEG ini, kita bisa mengevaluasi kemampuan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, jika kinerjanya menurun dan dibawah standar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, maka pegawai tersebut wajib mengikuti Diklat yang telah ditetapkan waktu dan tempat. Namun kalau kinerjanya meningkat atau pegawai tersebut berprestasi, kita akan mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Bungo untuk memberikan bantuan beasiswa untuk meningkatkan jenjang pendidikan pegawai tersebut”.

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai baik pegawai yang berprestasi maupun pegawai yang kurang berprestasi.

1. Analisis Manajemen pegawai sebagai informasi data output untuk Aplikasi SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo

Selain untuk mengevaluasi pengembangan dan pelatihan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Bungo, pemanfaatan Aplikasi SIMPEG yakni sebagai manajemen pegawai seperti: evaluasi kinerja kerja harian pegawai, produktivitas, kehadiran, dan disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sungging Prabowo selaku salah satu Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo,

“...pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dasar penilaian yang dipakai oleh Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih menggunakan DP3 (Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan) dan turunan dari *balance scorecard*, untuk saat ini belum ada Aplikasi SIMPEG untuk penilaian kinerja secara langsung, jadi saat ini penilaian kerja masih menggunakan berkas fisik, namun untuk pengembangan berikutnya akan dirancang aplikasi untuk penilaian kinerja pegawai”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna Sari Dewi selaku Kasubbag. Pembinaan Pegawai,

“...Penilaian kinerja dengan menggunakan berkas fisik memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan modul Aplikasi SIMPEG, hal ini dikarenakan pegawai yang ada pada biro kepegawaian harus menilik satu persatu berka yang berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai yang selanjutnya akan dinilai. Namun jika dalam Aplikasi SIMPEG sudah mencakup dalam penilaian pegawai, maka si pemakai SIMPEG akan lebih mudah dalam menilai pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang selanjutnya akan disimpan dan diakumulasikan secara bertahap”.

Didalam Aplikasi SIMPEG juga menyediakan menu *Time and Attendance* yang digunakan untuk memonitoring kehadiran pegawai. Berdasarkan hasil wawancara Unita Triyana selaku Kasubbag. Status Kepegawaian & Pensiun,

“...untuk penilaian kehadiran pegawai yang dipakai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dan instansi Pemerintah Kabupaten Bungo lainnya sudah menggunakan sistem *fingerprnt*, namun sistem *fingerprnt* ini belum terkoneksi langsung dengan Aplikasi SIMPEG, hal ini dikarenakan belum adanya menu aplikasi khusus yang terkait dengan absensi/kehadiran.

Hasil dari absen secara sistem *fingerprint* ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu penilaian disiplin pegawai tiap bulannya”.

Hal ini sependapat dengan hasil wawancara bersama M. Yusuf, “Aplikasi-aplikasi tersebut seharusnya sudah ada pada sebuah instansi pemerintahan. Karena saya menilai aplikasi-aplikasi tersebut kan dapat meringankan pekerjaan manajemen pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dengan adanya aplikasi absensi dan penilaian kinerja secara integrasi setiap instansi, kita bisa tahu dengan mudah mana pegawai yang disiplin dan pegawai tidak disiplin”.

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat membantu Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam memajemen pegawai.

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo sudah berjalan sesuai standarnya, namun masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang belum mengentrikan data-data kepegawaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Albert Silalahi. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algesindo Bandung, 2005

Amarin Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2003

Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Linggar Jaya, Bandung, 2004

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Effendy Uchjana Onong, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Efferin S., Darmadji S. Hadi, Tan Yuliawati. *Mertode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004

Hartono, Jogyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005

Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Jakarta, 2004

Kumorotomo W, Margono, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan kesembilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014

Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

- Soewarno Handayaniingrat. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2004
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, Andi Offset, Jakarta, 2005
- Widjaja AW, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006

Peraturan dan Perundang-undang

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, tentang *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011, tentang *pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah*
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang *tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo*

Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang *uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo*